

PENINGKATAN KOMPETENSI PERANGKAT NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG MELALUI PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGANBERBASIS DIGITAL

Elvi Rahmi¹, Aimatul Yumna², Deviani³

¹)Departemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang

²)Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang

³)Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang

e-mail: elvirahmi83@fe.unp.ac.id

Abstrak

Provinsi Sumatera Barat menggunakan istilah Nagari untuk menyebut desa, dimana nagari merupakan lembaga pemerintah dan sekaligus merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga kesatuan masyarakat, nagari dituntut untuk mampu melaksanakan pemerintahan yang bersifat *good governance*. Sesuai UU No.6 tahun 2014, pemerintah desa memperoleh dana 10% dari total anggaran Pemerintah yang harus dikelola untuk program pengembangan desa. Untuk memastikan dana desa ini dimanfaatkan dengan baik, diperlukan suatu sistem pelaporan keuangan desa. Akan tetapi, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perangkat nagari belum memiliki kompetensi yang belum memadai dalam mengelola dan melaporkan keuangan nagari secara baik dan akuntabel. Kegiatan PKM (Program Kemitraan Masyarakat) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat Nagari Koto Simalanggang untuk melakukan pencatatan laporan keuangan dana desa menggunakan aplikasi digital, terutama SISKEUDES. Kegiatan PKM dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2023 bertempat di Kantor Wali Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh dihadiri oleh semua perangkat Nagari dan kepala jorong. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 12 orang. Metode pelatihan yang diberikan berbentuk bimbingan terpadu, dimulai dengan melakukan *pre-test* terkait kemampuan peserta mengenai pengelolaan keuangan nagari, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi diselingi tanya jawab dan diskusi. Akhir pelatihan peserta melakukan *post-test* untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta dalam memahami materi pelatihan yang diberikan. Setelah mendapatkan pelatihan dari kegiatan ini, dapat dilihat peningkatan pemahaman dan ketrampilan perangkat Nagari secara signifikan. Hasil kegiatan PKM ini diharapkan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: Dana Desa, Siskeudes, Laporan Keuangan Desa

Abstract

West Sumatra Province uses the term Nagari to refer to villages, where the nagari is a government institution and at the same time a community empowerment institution. As a public institution, nagari are required to be able to implement good governance. In accordance with Law No. 6 of 2014, the village government obtains 10% of the total government budget that must be managed for village development programs. To ensure that these village funds are utilized properly, a village financial reporting system is needed. However, previous studies have shown that village officials do not yet have adequate competence in administering, managing and reporting village finances in a good and accountable manner. This PKM activity aims to increase the knowledge and skills of the Nagari Koto Simalanggang apparatus to record village fund financial reports using digital applications, especially SISKEUDES. The PKM activity was carried out on August 5, 2023 at the Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota, attended by all Nagari officials and the head of the jorong. The number of training participants was 12 people. The training method provided is in the form of integrated guidance, starting with conducting a pre-test related to the participants' abilities regarding managing village finances, then continuing with the provision of material interspersed with questions and answers and discussions. At the end of the training, participants carry out a post-test to measure the increase in participants' competence in understanding the training material provided. After receiving training from this activity, it can be seen that the understanding and skills of Nagari officials have increased significantly. The results of this PKM activity are expected to realize transparency and accountability in village financial management.

Keywords: Village Funds, Siskeudes, Village Financial Statement

PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Barat menggunakan istilah nagari untuk menyebut desa, dimana nagari merupakan lembaga pemerintah dan sekaligus merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat (Raharjo, M. M. I. (2021)). Pemerintah nagari diatur oleh UU No. 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan desa karena pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sama persis dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan Provinsi Sumatera Barat ini selaras dengan kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia tentang penyelenggaraan Pemerintahan desa terutama dalam kebijakan pembagian dana perimbangan. Dana perimbangan yang digunakan yakni dana alokasi umum yang diterima pemerintah Kabupaten/Kota dalam APBD, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No.23 tahun 2014 dan UU No. 6 tahun 2014. di Sumatera Barat Alokasi Dana Nagari (ADN) yang dibagikan oleh Bupati setempat berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, jumlah penduduk, luas wilayah dan status desa tertinggal atau tidak tertinggal, sehingga alokasi dana yang diterima Nagari-nagari tidaklah sama besar. Selain itu, terdapat Dana Desa (DD) diterima Nagari dari alokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Desa dengan program-program yang diprioritaskan dengan indikator yang ditetapkan Kementerian Desa untuk setiap Nagari (Fontanella, A., & Chandra, N.,2017)

Laporan keuangan Nagari menjadi sangat penting seiring dengan banyaknya dana Nagari yang disalurkan dari berbagai sumber pendapatan desa. Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, desa mendapatkan tujuh sumber pendapatan, yaitu pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dana desa dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota, dan pendapatan yang sah. Pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi terkait pengelolaan dana desa berupa Peraturan Pemerintah Nomor 43 dan 60 tahun 2015. Keluarnya regulasi tersebut diharapkan tidak lagi ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan, sehingga para perangkat Nagari harus bisa mengelola dana desa dengan baik (Agustin, H., et al., 2017).

Beberapa penelitian dan data lapangan menunjukkan bahwa aparatur desa kurang memiliki pemahaman tentang pengelolaan keuangan nagari (Arza, F. I., et.al2019; Defitri, S. Y., 2018). Hal ini bisa dipahami mengingat pengelolaan dana nagari merupakan hal yang relatif baru, dan pemerintahan nagari secara berkala juga terjadi pergantian dan perubahan sehingga pemahaman tentang pengelolaan keuangan dana nagari sangat dibutuhkan untuk meningkatkan tatakelola, transparansi dan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dan pelaksanaan kegiatan.

Dari hasil wawancara awal yang dilakukan dengan walinagari koto Baru Simalanggang, diketahui bahwa pengelolaan laporan keuangan nagari koto Baru Simalanggang masih belum maksimal. Tenaga keuangan nagari baru melakukan pencatatan secara manual dan pencatatan transaksi serta penyusunan rencana anggaran belanja nagari dilakukan secara terpisah, belum terintegrasi sehingga ada potensi ada kesalahan dan kekeliruan ataupun dobel pencatatatan. Beberapa permasalahan ini mengakibatkan adanya terkadang kesalahpahaman, baik antar perangkat nagari maupun dengan badan Musyawarah Nagari (BAMUS Nagari). Disamping itu karena pencatatan belum terintegrasi, maka laporan keuangan nagari tidak tersedia secara realtime, membutuhkan waktu untuk penggabungan dan penyusunan terakait pemasukan dan pengeluaran nagari, karena tidak berasal dari satu sumber. Dari wawancara dan observasi juga diketahui bahwa latar belakang perangkat nagari yang sekarang adalah perangka baru, dimana mereka baru dilantik pada Maret 2022. Latar Belakang Pendidikan perangkat bervariasi, ada yang tamatan SMP, SMA, diploma dan Sarjana, namun perangkat nagari tidak memiliki latar belakang pendidikan bidang Ekonomi. Kondisi ini menyebabkan mereka membutuhkan waktu untuk bisa memahami mengenai pengelolaan keuangan, Menyusun rencana dan anggaran belanja nagari serta menyusun laporan keuangan nagari secara berkala dan sesuai standar pelaporan.

Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah memberikan pelatihan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan berbasis digital. Output dari pelatihan ini diharapkan perangkat nagari dan jorong mampu mengelola keuangan nagari dengan sebaik mungkin yang dimulai penyusunan rencana pendapatan dan belanja nagari sampai pada penyusunan laporan keuangan Nagari. sehingga nantinya pemerintahan Nagari Koto Baru Simalanggang adalah pemerintahan yang menerapkan konsep good governance dan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah memberikan pelatihan melalui bimbingan terpadu kepada perangkat nagari di Kanagarian Koto Baru Simalanggang mengenai perancangan

dan penyusunan laporan keuangan berbasis digital, pelatihan ini akan dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:

1. Melaksanakn Pre-test, Pre-test dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta pelatiha
2. Pelatihan dan diskusi Metode pelatihan digunakan untuk memperkenalkan tentang penggunaan aplikasi untuk penyusunan laporan keuangan secara digital. Kegiatan pelatihan ini ini diselingi dengan diskusi/tanya jawab untuk mendapatkan respon dan umpan balik dari peserta tentang materi yang disampaikan
3. Melaksanakan Post-test, Post test dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh peserta sesudah pelatihan dilakukan.
4. Evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan masukan dari mitra terkait pelatihan yang dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM diawali dengan wawancara mendalam dengan walinagari terkait pelatihan dan materi yang dibutuhkan oleh mitra, saat wawancara juga disepakati waktu dan pelaksanaan PKM yang akan dilaksanakn. Kegiatan PKM dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2023 bertempat di Kantor Wali Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh dihadiri oleh semua perangkat Nagari dan kepala jorong. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 12 orang. Metode pelatihan yang diberikan berbentuk bimbingan terpadu, dimulai dengan melakukan pre-test terkait kemampuan peserta mengenai pengelolaan keuangan nagari, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi diselingi tanya jawab dan diskusi. Akhir pelatihan peserta melakukan post-test untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta dalam memahami materi pelatihan yang diberikan.

Materi pelatihan disampaikan oleh Bapak Halkadri Fitra, S.E, M.M Ak dari Departemen Akuntansi FEB UNP yang memiliki Background kepakaran Akuntansi Pemerintahan. Materi pelatihan meliputi tiga hal utama : pemahaman implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasn migrasi Republik Indonesia no. 8 tahun 2022 dan Pengalokasian dana desa Sesuai dengan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 dan PMK No. 201/PMK.07/2022, optimalisasi pemanfaatan aplikasi digital seperti SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) untuk pencatatan laporan keuangan desa, Sistem Informasi Desa (SID), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), Sistem informasi kesejahteraan sosial, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPEDA) dan Sistem Pengelolaan Asset Desa (SIPADES) serta strategi dalam pengembangan nagari digital di Sumatera Barat.

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan pelatihan yang dilakukan, dilakukan pre-test dan post-test untuk para peserta. Soal yang ditanyakan adalah terkait dengan materi pelatihan yaitu pemahaman implementasi peraturan terkait dana desa dan pemahaman terkait jenis akun dalam aplikasi SISKEUDES. Hasil pre-test dan post test disampaikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1 : Penilaian Pre dan Post-test

Responden	Skor Pre-test	Skor Post-test
1	4	10
2	3	9
3	5	10
4	4	8
5	5	10
6	7	10
7	5	10
8	5	9
9	4	10
10	3	7
11	3	8
12	3	
Rata-rata nilai	4.25	9.18

Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa penguasaan materi peserta pelatihan terkait pemanfaatan dana desa dan laporan keuangan desa masih sangat terbatas, dapat dilihat dari nilai pre-test yang memiliki rata-rata 4.25. Artinya perangkat Nagari Koto Simalanggang hanya memahami sedikit dari materi yang ditanyakan. Setelah dilakukan pelatihan dan bimbingan intensif, tim PKM mengadakan post-test dengan pertanyaan yang sama dan diperoleh hasil rata-rata nilai peserta meningkat menjadi 9.18. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan PKM yang dilakukan mampu meningkatkan pemahaman perangkat Nagari Koto Simalanggang tentang dana desa dan laporan keuangan desa. Data di atas melihtkan bahwa ada peningkatan kompetensi perangkat nagari dengan adanya pelatihan yang diberikan. Sesuai dengan pendapat Apriliana, S. D., & Nawangsari, E. R. (2021). bahwa pelatihan merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan pegawai atau karyawan yang telah menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kegiatan pelatihan bisa berjalan lancar, Faktor-faktor yang menunjang pelaksanaan kegiatan ini dapat dikemukakan sebagai berikut: a). Semangat dan antusiasme peserta dalam mengikuti pelatihan, karena kegiatan pelatihan ini sangat mereka butuhkan. Pemanfaatan aplikasi siskeudes versi 2.0.5. b). Keingintahuan dari para peserta yang cukup besar terhadap materi pelatihan, ini terlihat dari antusias mereka untuk bertanya, dan berdiskusi. c) Dukungan dari pihak nagari yang menyediakan fasilitas ruangan dan peralatan pendukung lainnya, sehingga memudahkan dalam penyampaian materi.d. Kerjasama tim pelaksana kegiatan pelatihan, , dan pihak nagari yang cukup solid. Akhir dari kegiatan PKM ini memberikan survey untuk mengevaluasi kepuasan peserta pelatihan. Hasil dari survey tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Survey Pelaksanaan Pelatihan

No.	Pernyataan	SS(%)	S(%)	TS(%)	STS(%)
1	Materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bapak/ibu	81,82	18,18		
2	Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan harapan Bapak/ibu	63,64	36,36		
3	Materi PKM yang disajikan berguna untuk pekerjaan Bapak Ibu	81,82	18,18		
4	Narasumber menyampaikan Materi Pelatihan mudah untuk dipahami	81,82	18,18		
5	Narasumber menyampaikan Materi Pelatihan dengan cara yang menarik	90,91	9,09		
6	Waktu pelaksanaan Materi Pelatihan sesuai	81,82	18,18	9.09	
7	Bapak ibu mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan PK yang dilaksanakan	81,82	18,18		
8	Secara Umum Bapak Ibu Puas terhadap kegiatan Pelatihan yang diberikan	81,82	18,18		

Sumber : Data diolah 2023

Hasil dari survey pelaksanaan pelatihan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta pelatihan menyatakan sangat setuju (SS) bahwa pelatihan ini sesuai dengan kebutuhan dan berguna untuk membantu pekerjaan perangkat Nagari. Sebagian besar peserta pelatihan juga menyatakan bahwa narasumber menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami serta sebagian besar peserta juga menyatakan manfaat dan puas dengan kegiatan PKM ini.

SIMPULAN

Kegiatan PKM ini dilatarbelangi oleh permasalahan rendahnya kemampuan perangkat Nagari di Koto Simalanggang untuk menyusun laporan keuangan pemanfaatan dana desa. Kegiatan PKM ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat Nagari Koto Simalanggang untuk melakukan pencatatan laporan keuangan dana desa menggunakan aplikasi digital, terutama SISKEUDES versi 2.0.5. Setelah mendapatkan pelatihan dari kegiatan ini, dapat dilihat peningkatan pemahaman dan ketrampilan Perangkat Nagari secara signifikan. Hasil ini diharapkan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

SARAN

Kegiatan ini menyarankan untuk memberikan pelatihan secara periodik untuk perangkat nagari dalam mewujudkan cita-cita menjadi desa digital, dikarenakan literasi digital yang terus berkembang menuntut masyarakat dan perangkat Nagari untuk terus mengembangkan diri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNP yang telah memberi dukungan financial dan moral terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H., Arza, F. I., Mulyani, E., & Fitra, H. (2017). Potret Pertanggung Jawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. *Wahana Riset Akuntansi*, 5(2), 1019-1028.
- Apriliana, S. D., & Nawangsari, E. R. (2021, November). Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (sdm) berbasis kompetensi. In *Forum Ekonomi* (Vol. 23, No. 4, pp. 804-812).
- Arza, F. I., Handayani, D. F., & Honesty, F. F. (2019). PKM Peningkatan Kemampuan Aparatur Nagari Dalam Mengelola Keuangan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa. *Wahana Riset Akuntansi*, 7(2), 1513-1520.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi*, 3(1), 64-75.
- Fontanella, A., & Chandra, N. (2017). Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Desa/Nagari. *Akuntansi dan Manajemen*, 12(1), 50-65.
- Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan keuangan desa dan aset desa*. Bumi Aksara.